

NASKAH PUBLIKASI

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TERHADAP KONDISI KEMISKINAN**

**(Studi Comparasi Desa Caturharjo, Trimulyo. Dan Pandowoharjo
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y Tahun 2016)**

Dicky Gustiyana

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

dicky.gustiyana54@gmail.com

NASKAH PUBLIKASI

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TERHADAP KONDISI KEMISKINAN**

**(Studi Kasus di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo Kecamatan
Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Y Tahun 2016)**

Disusun oleh :

DICKY GUSTIYANA

20140520193

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 3 Maret 2018

Tempat : Ruang IGOV lama


Jam : 08.00 – 09.00 WIB

Dosen Penguji



Dr. Ulung Pribadi, M.Si.

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik**


Dr. Titin Pujiwaningsing, S.IP., M.Si

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TERHADAP KONDISI KEMISKINAN
(Studi Kasus di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo Kecamatan
Sleman Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Y Tahun 2016)**

Dicky Gustiyana

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Indonesia

dicky.gustiyana.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dan bukan lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Perkembangan kondisi kemiskinan menurut BPS Sleman tahun 2017 di Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2016 bersifat *fluktuatif*. Artinya bahwa kondisi kemiskinan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil meskipun secara persentase mengalami penurunan, tak terkecuali dengan kondisi kemiskinan di Kecamatan Sleman yang berada di urutan kelima pada tahun 2016 sebesar 23,24%, maka dibutuhkan upaya dan kebijakan serta arah strategis dalam menanggulangi kemiskinan. Menanggapi persoalan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan melibatkan Aparatur Desa dalam membentuk TPK Desa/Padukuhan sebagai pelaksana teknis kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *mixed methode* yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif (analisis regresi) dengan melakukan penelitian terhadap pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peran aparatur pemerintah desa terhadap kondisi kemiskinan di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo Kecamatan Sleman. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menyebar angket kuisioner sebanyak 150 responden, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Caturharjo pada tahun 2016 aspek yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan ialah Komunikasi (X1) sebesar 13,2% dan peran aparatur desa aspek yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan ialah Sikap (X9) sebesar 14,7%. Berbeda dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Trimulyo aspek

yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan ialah Disposisi (X3) sebesar 15,4% dan peran aparatur desa aspek yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan ialah Minat (X10) sebesar 25%. Sedangkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Pandowoharjo aspek yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan ialah Komunikasi (X1) sebesar 17% dan peran aparatur desa aspek yang paling tinggi pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan ialah Sikap (X9) sebesar 19,9%.

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peran aparatur desa di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo terhadap kondisi kemiskinan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Peran Aparatur Desa.

1. Pendahuluan

Perkembangan kemiskinan di Indonesia sejak era reformasi bersifat *fluktuatif*, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan ditingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk menindaklanjuti Perpres tersebut maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Septian (2016) menyebutkan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, Pemerintah merumuskan beberapa kebijakan dan program. Program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tersebar dan dilaksanakan oleh beberapa kementerian, sedangkan pemerintah daerah dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kabupaten Sleman dalam upaya menanggulangi kemiskinan telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati nomor 136/Kep.KDH/ A/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dalam praktiknya pengembangan kelembagaan penanggulangan kemiskinan berada di tingkat Kecamatan hingga padukuhan, dengan dikeluarkannya pedoman teknis pelaksanaan revitalisasi/pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan hingga tingkat pedukuhan. Lembaga tersebut disebut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Pada Tahun 2017 Kabupaten Sleman mempertegas dengan dikeluarkannya Perda No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang merujuk pada UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana dalam mengentaskan kemiskinan terdapat upaya yang memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

Kehadiran lembaga teknis seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kabupaten Sleman telah memberikan pengaruh yang cukup baik bagi penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu empat tahun terakhir terhitung pada Tahun 2012 akan tetapi perkembangannya masih bersifat *fluktuatif*. Di Kecamatan Sleman sendiri perkembangan kondisi kemiskinan masih terdapat kendala dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Jika melihat data yang ada Kecamatan Sleman termasuk dalam sepuluh besar kecamatan miskin yang ada di Kabupaten Sleman dengan mempertimbangkan jumlah

KK dan Penduduk Miskin. 3 Desa yang mengalami tingkat kemiskinan tinggi diantaranya, Desa Caturharjo dengan persentase 22,27%, Desa Trimulyo 16,73%, dan Desa Pandowoharjo 14,78%. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Kemiskinan di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo Tahun 2016 ?
2. Sejauhmana Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Terhadap Kondisi Kemiskinan Tahun 2016 ?
3. Sejauhmana Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Terhadap Kondisi Kemiskinan Tahun 2016 ?

II. Kerangka Teori

a. Implementasi Kebijakan

Webster (dalam Novandric, 2015:6) mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Pada prinsipnya implementasi merupakan cara suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan tujuan agar harapan dan kepentingan publik yang diinginkan dapat terwujud didalam realitas atau dengan kata lain bagaimana suatu kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari sebuah proses kebijakan publik yang

menentukan apakah sebuah kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan publik serta kebijakan dapat diterima dengan baik oleh publik.

Para ahli menjelaskan terkait dengan pendekatan proses kebijakan, salah satu pendekatan proses kebijakan menurut Menurut Abdullah (dalam Bakhtiar:2015) bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

- 1) Proses implementasi program/kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program ataukebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
- 2) Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai atau “*outcomes*” unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yang harus diperhatikan yaitu:
 - a. Implementasi program atau Kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu factor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pembangunan.
 - b. Target groups yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut.

- c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.
- d. Strategi perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pengawasan implementasi tersebut.

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:177) mengemukakan studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan Edwards berpendapat terdapat empat faktor atau variabel krusial yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Empat faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dengan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal ialah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Adapun empat faktor menurut Edwards dalam Winarno (2014) yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut :

1) Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). **Transmisi**, Artinya bahwa sebelum pejabat/pelaksana dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya

telah dikeluarkan. **Kejelasan**, artinya bahwa jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. **Konsistensi**, Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2) Sumber-Sumber

Untuk mendukung terlaksananya suatu implementasi maka, pelaksana kebijakan membutuhkan sumber-sumber yang diperlukan seperti; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. **Staf**, merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut juga harus didukung oleh jumlah sumber daya manusia yang cukup, cakap (keahlian), serta harus memiliki pengetahuan (*knowing what to do*) dalam melaksanakan kebijakan. **Informasi**, merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi terbagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, dalam hal ini pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana dalam bersikap. *Kedua*, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. **Wewenang**, merupakan sumber daya lain yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Wewenang sangat diperlukan, terutama untuk

menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. **Fasilitas**, merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan seperti gedung, agar memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3) Kecenderungan-Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Ada dua indikator yang dikemukakan oleh Edwards. **Dampak dari kecenderungan-kecenderungan**, menurut Edwards banyak kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilakukan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. **Pengangkatan Birokrat**, kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggungjawab kepada pemimpin mereka.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran–ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)*, dengan menggunakan prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. *fragmentasi* yang menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terdistorsi.

b. Kompetensi Aparatur Desa

Pengertian kompetensi dalam organisasi publik sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa yang akan datang dalam tatanan

kehidupan masyarakat. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang sudah ditetapkan (Sutrisno, 2009 : 202).

Perangkat desa sebagai bagian dari sumber daya manusia yang merupakan bagian terpenting dari unsur pelaku desa memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Gunawan (2013) berpendapat bahwa Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Perangkat desa yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan (KAUR), kepala seksi (KASI), dan unsur kewilayahan atau kepala dusun (KADUS) yang terdapat didalam pemerintahan desa. Perangkat desa dituntut untuk mempunyai kompetensi serta mampu mengembangkan masyarakat dan mampu mengelola segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*good governance*) dengan bercirikan demokratis juga desentralistis (Yuliawan, 2016).

Kompetensi yang harus dikuasai oleh SDM (Aparatur Desa) perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas dalam program yang sudah dirumuskan dan akan diimplementasikan dengan mengacu pada pengalaman langsung. Penilaian

terhadap capaian kompetensi harus dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja aparatur yang ada di dalam organisasi pemerintah. Gordon (dalam Sutrisno, 2009:204) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang pegawai mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam organisasi.
- 2) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
- 3) Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan pegawai dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- 4) Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para pegawai dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, dan demokratis).
- 5) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

6) Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan suatu aktivitas kerja.

c . Kemiskinan

Kemiskinan menurut Friedman (1997) adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi: *Pertama*, modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. *Kedua*, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. *Ketiga*, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. *Keempat*, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. *Kelima*, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2014).

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang disebut miskin dan tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun dari berbagai studi yang ada, Suyanto (2014:5) merumuskan beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu :

- a. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan lainnya.
- b. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah

sehingga berpeluang untuk tidak belajar. sehingga secara turun-temurun terjerat dalam keterbelakangan garis kemiskinan.

- c. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada maka kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian. Karena petani bekerja dengan musiman, maka kesinambungan kurang terjamin.
- d. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota dibanyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa.

d. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggungjawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplematasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperhatikan berbagai kelemahan, antara lain: (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada trasformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 2008).

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dan kuantitatif, atau biasa disebut dengan Mixed method dimana dalam metode ini dapat menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Dalam teknik analisis data dengan jenis penelitian kuantitatif yaitu dengan cara regresi tujuannya agar hasil penelitian ini diperkuat dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, serta dari data yang diperoleh dari hasil kuisisioner.

IV. Pembahasan

- a. Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kondisi Kemiskinan.

Pada bagian ini penulis membandingkan sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap kondisi kemiskinan di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo pada Tahun 2016.

Tabel di bawah ini menjelaskan hasil yang didapat dari kuisisioner maupun hasil wawancara yang telah penulis analisis ;

No	Desa Caturharjo	Desa Trimulyo	Desa Pandowoharjo
1.	- Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Caturharjo sudah cukup baik dipraktekan oleh TPK baik di tingkat Padukuhan/Desa, hanya saja terdapat kesalahpahaman antara peserta program seperti RTLH dengan panitia program mengingat SDM dari peserta program RTLH berpendidikan rendah.	- Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Trimulyo sudah cukup baik, dimana semua elemen masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, TPK, dan Tokoh Masyarakat setempat dilibatkan dalam menanggulangi kemiskinan dengan diadakanya sosialisasi bertujuan untuk monitoring, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.	- Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Pandowoharjo sudah dilakukan dengan sangat baik dimana aktor pelaksana kebijakan selalu memperhatikan arahan dari semua <i>stackholder</i> yang terlibat didalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sehingga terciptanya suatu transmisi komunikasi yang baik.

<p>2.</p>	<p>- Sumber Daya dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan di Desa Caturharjo meliputi fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan program sudah cukup baik dengan dibantu oleh personalia TPK Desa yang meliputi tokoh masyarakat sebagai motor penggerak dalam menanggulangi kemiskinan dengan di tanggung jawabkan oleh Kepala Desa sesuai Keputusan Kepala Desa Caturharjo Nomor 04/Kep.Des/2012 tentang Susunan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Caturharjo.</p>	<p>- Sumber Daya di Desa Trimulyo meliputi sarana dan prasarana, serta terdapat fasilitas seperti gedung untuk menunjang kegiatan program sudah baik dengan dibantu oleh personalia TPK Desa sesuai dengan dengan Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor09/Kpts.KD/2012 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Trimulyo. Akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal anggota di lingkup padukuhan, karena belum memanfaatkan teknologi informasi untuk mendata peserta program jadi hanya bersifat tradisional.</p>	<p>Sumber Daya di Desa Pandowoharjo sudah sangat baik dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas dalam melakukan kegiatan program penanggulangan kemiskinan. Dan jumlah personalia yang setara dengan kemampuan dan kompetensi sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 09/Kpts.KD/2015 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Periode 2015-2018 Desa Pandowoharjo.</p>
<p>3.</p>	<p>-Disposisi/Sikap Pelaksana di Desa Caturharjo sudah bekerja dengan baik memberikan arahan kepada aktor kebijakan di tingkat padukuhan dan melibatkan tokoh masyarakat dengan ditanggungjawabkan kepada ketua TPK Desa yaitu Kepala Desa. Selama kegiatan program penanggulangan berjalan terdapat hambatan pada sikap</p>	<p>- Disposisi/Sikap Pelaksana di Desa Trimulyo sudah dilakukan dengan baik, dimana pada Tahun 2016 merupakan tahun diselenggarakannya RTLH kisaran 20 KK Miskin dengan diberikan bantuan tunai 15 juta rupiah yang bertujuan untuk membeli peralatan rumah tidak layak huni. Dalam prakteknya masih</p>	<p>- Disposisi/Sikap Pelaksana di Desa Pandowoharjo dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan baik antar pemangku kepentingan yang ada di Desa Pandowoharjo, bilamana terdapat peserta program penanggulangan kemiskinan yang belum mengetahui kapan diadakanya sosialisasi</p>

	pelaksana dalam memilih peserta program seperti PKH masih kurang tepat sasaran hal tersebut dikarenakan banyaknya aduan dari masyarakat kepada pelaksana, akan tetapi pelaksana kurang memperhatikan hal tersebut.	terdapat kekurangan terkait anggaran maka sikap yang diambil oleh petugas atau pelaksana melakukan musyawarah bersama masyarakat setempat untuk mencari jalan keluar.	program dan pelaksanaan maka petugas akan melakukan door to door kepada peserta agar mengikuti arahan yang telah diberikan oleh SKPD terkait dengan program yang sedan atau akan dilakukan.
4.	- Struktur Birokrasi dalam hal ini meliputi SOP dan fragmentasi. Di Desa Caturharjo sendiri sudah memiliki standard operational (SOP) sehingga aktor pelaksana dapat bekerja dengan baik serta efisien dalam memanfaatkan waktu selama kegiatan berlangsung dan peserta program tidak merasa kesulitan dalam mengurus berkas untuk program yang sudah dijalankan oleh tiap SKPD.	- Struktur Birokrasi di Desa Trimulyo dalam mengimplementasikan program kemiskinan seperti PKH, RTLH, bantuan subsidi listrik sudah menerapkan Standard operational (SOP) yang mengacu pada mengacu pada PerDes Trimulyo Nomor: - Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedure (SOP) dan Standar pelayanan (SP) Pelayanan Umum Desa Trimulyo.	- Struktur Birokrasi di Desa Pandowoharjo meliputi Standard pelayanan bagi masyarakat bertujuan agar segala urusan menyangkut bantuan baik sifatnya materi ataupun pelatihan sebagai bentuk menanggulangi kemiskinan sudah sangat baik, hal tersebut mengacu pada Kept. Kep. Des Pandowoharjo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan.

b. Pengaruh Peran Aparatur Pemerintah Desa terhadap Kondisi Kemiskinan.

Tabel di bawah ini akan menjelaskan hasil yang didapat dari kuisisioner maupun hasil wawancara yang telah penulis analisis ;

No	Desa Caturharjo	Desa Trimulyo	Desa Pandowoharjo
1.	-Pengetahuan Aparatur Desa Caturharjo dalam mengimplementasikan	- Pengetahuan Aparatur Desa Trimulyo dalam mengimplementasikan programpenanggulangan	- Pengetahuan Aparatur Desa Pandowoharjo mengimplementasikan kebijakan

	kebijakan penanggulangan kemiskinan terhadap kondisi kemiskinan terdapat dua butir pernyataan pertama bahwa penguasaan secara teknis oleh aparatur desa dalam melaksanakan program dirasa cukup baik oleh masyarakat, kedua sasaran peserta program seperti PKH RTLH pada Tahun 2016 dirasa cukup baik dan tepat sasaran.	kemiskinan secara penguasaan teknis dari beberapa SKPD sudah mengikutimekanismenya hanya saja untuk program PKH yang menjalankan dari Kecamatan dan Desa hanya sebagai perantara saja dalam menysasar masyarakat yang memiliki anak sekolah.	penanggulangan kemiskinan terhadap kondisi kemiskinan dalam menguasai teknis program RTLH, PKH, Beras Rastra, dan Bantuan subsidi listrik sudah mengikuti mekanisme yang berlaku dengan baik. Sedangkan untuk sasaran peserta program petugas sudah mendata dengan baik hanya saja terdapat kendala dalam mendata peserta.
2.	- Pemahaman yang dimiliki oleh Aparatur Desa Caturharjo dalam menerapkan SOP yang sudah dibuat dalam melaksanakan kegiatan program penanggulangan kemiskinan sudah terlaksana dengan baik.	- Pemahaman Aparatur Desa Trimulyo dalam menggunakan SOP/aturan yang berlaku untuk melakukan pelayanan program-program penanggulangan kemiskinan dirasakan masyarakat cukup. Hal tersebut.	- Pemahaman Aparatur Desa Pandowoharjo dalam menggunakan SOP sebagai mekanisme pengaduan permasalahan kemiskinan sudah diterapkan dengan baik, hal tersebut berhasil mendapatkan prestasi di TPK Awards Kabupaten Sleman 2016.
3.	-Kemampuan Aparatur Desa Caturharjo dalam melakukan pendataan untuk peserta program kemiskinan Tahun 2016 berjalan dengan baik dan tepat sasaran, hal tersebut hasil dari pembelajaran tahun sebelumnya bahwa penerimaan program yang tidak tepat sasaran.	- Kemampuan Aparatur Desa Trimulyo dalam melakukan pendataan KSM dan KRM terbilang cukup. Data tersebut dapat diperkuat dengan hasil pendataan warga miskin dan rentan miskin yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Bapak Surahman A.Md.	- Kemampuan Aparatur Desa Pandowoharjo dalam mendata keluarga miskin dan rentan miskin terbilang baik dan adanya kesesuaian antar peserta program seperti Rastra, PKH, dan RTLH Tahun 2016.
4.	-Nilai yang diterapkan oleh Aparatur Desa Caturharjo Tahun	- Nilai yang dimiliki oleh Aparatur Desa Trimulyo Tahun 2016	- Nilai yang dimiliki Aparatur Desa Pandowoharjo dalam

	<p>2016 dalam menanggulangi kemiskinan tidak menyalahgunakan wewenang dan tugasnya, hal tersebut terlihat dalam melakukan pendataan oleh Kasi Kesejahteraan serta adanya keterbukaan informasi terkait dengan sosialisasi dari tiap SKPD yang turun langsung pada masyarakat.</p>	<p>dalam menanggulangi kemiskinan sedikit adanya sikap kekeluargaan dalam mendata peserta program, hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang lain. untuk keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan program-Aparatur Desa sudah memberikan pelayanan yang layak.</p>	<p>memberikan pelayanan terkait pengaduan permasalahan kemiskinan sudah sangat baik, pihaknya selalu memonitoring program yang sedang berjalan khususnya program yang bersifat pelatihan dan pengembangan potensi yang ada di masing-masing wilayah padukuhan.</p>
5.	<p>- Sikap yang dimiliki Aparatur Desa Caturharjo sudah cukup baik, masyarakat khususnya peserta program PKH, Rastra, RTLH, dan Bantuan subsidi listrik dilayani dengan baik dan sepenuh hati oleh petugas dilapangan.</p>	<p>- Sikap Aparatur Desa Trimulyo terhadap TPK Desa/Padukuhan saling bersinergi hal tersebut tak lepas dari misi Pemerintah Desa Trimulyo yang termuat untuk menanggulangi kemiskinan. Pihaknya sudah memberikan yang terbaik serta setulus hati.</p>	<p>- Sikap Aparatur Desa Pandowoharjo dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan baik yang sifatnya bantuan, pelatihan, dan pengembangan potensi sudah sangat baik dilakukan dan saling memberikan sikap keterbukaan kepada masyarakat.</p>
6.	<p>- Minat, dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan Aparatur Desa Caturharjo saling bekerja sama untuk menanggulangi kemiskinan, pihaknya membagi tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.</p>	<p>- Minat, Aparatur Desa Trimulyo sangat menyambut baik dengan adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan, mengingat 60% warganya masih terjerat kedalam pra-sejahtera maka pihaknya sedang berupaya untuk membuat pelatihan.</p>	<p>- Minat, Aparatur Desa Pandowoharjo dengan TPKDesa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan potensi di masing-masing padukuhan sebagai bentuk memberdayakan warga dan pemuda.</p>

V. Saran

Untuk aspek komunikasi yang mencakup transmisi, sosialisasi program penanggulangan kemiskinan di Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo sudah cukup baik hanya saja TPK di tingkat Padukuhan harus bisa memberikan inovasi dalam penyampaian kepada masyarakat sehingga masyarakat turut memberikan ide/gagasan agar program penanggulangan kemiskinan lebih ditekankan pada pelatihan dan pengembangan potensi yang ada. Aspek Sumber daya di tiga Desa sudah cukup, kedepan agar melibatkan tokoh pemuda sebagai motor penggerak sehingga tidak terjadi permasalahan kemiskinan dikalangan pemuda. Disposisi/sikap pelaksana di tiga Desa sebagai objek penelitian sudah diterapkan namun masih terdapat kendala seperti; kurang pahamiannya petugas di tingkat Padukuhan akan tupoksinya. Kemudian untuk aspek Struktur birokrasi pada tiga Desa sudah menerapkan standard pelayanan yang layak akan persoalan pengaduan kemiskinan hanya saja ditingkat bawah belum mengetahui hal tersebut.

Peran aparatur Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo akan pentingnya dalam menanggulangi kemiskinan sudah menjalankan enam aspek sebagai mana yang disebutkan oleh Gordon yaitu; Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan, Nilai, Sikap, dan Minat. Yang menjadi evaluasi di tahun yang akan datang yaitu Aparatur Desa Caturharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo harus lebih berkontribusi membangun masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi warga miskin maupun rentan miskin.

Daftar Pustaka

- Akbar, Rizky. (2014). Pengaruh Kemampuan, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Tambaksari Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Surabaya: Repository Unair.
- Aneta, Asna. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Bakhtiar, Nur. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Berbah Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Digital Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bappenas. (2013). *Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012*. Jakarta.
- Hudaya, Dadan. (2009). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Bogor: Repository IPB.
- Jonnadi, Arius. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*.
- Moleong, Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset.
- Noor, Munawar. (2014). Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang). *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*. Semarang: UNTAG
- Novandric, D.M. (2015). Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Surabaya: Repository Unair.
- Nugroho. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rubiyanah, Minarsih, M.M. & Hasiolan, B.L. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Journal of Manajement, Vol 02 No 2*. Semarang: Jurnal.Unpand.

- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto, Bagong. (2014). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Tantowi, Ahmad. (2010). *Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Pustaka Universitas Negeri Surakarta.
- Widodo, E.S. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yuliawan, Rezal. (2016). *Peran Perangkat Desa untuk Mengembangkan Prinsip Transparansi dalam Good Governance pada Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)*. Sukoharjo: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Regulasi

- Keputusan Kepala Desa Caturharjo Nomor 04/Kep./Des/2012 tentang Pembentukan Personalia Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.
- Keputusan Kepala Desa Pandowoharjo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan.
- Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor 09/Kept.KD/2012 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa Trimulyo Kecamatan Sleman.
- Keputusan Kepala Desa Trimulyo Nomor Nomor:- Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (SP) Pelayanan Umum Desa Trimulyo Kecamatan Sleman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Surat Keputusan Bupati nomor 136/Kep.KDH/ A/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

UU No 06 Tahun 2016 tentang Desa.

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Website :

Afrianto. (2017, Januari 03). *Begini Pergerakan Angka Kemiskinan di Indonesia Sejak Era Reformasi*. Diakses Oktober 18, 2017, dari <https://economy.okezone.com>

Website Resmi BPS: <https://www.bps.go.id/>. Diakses 16 Oktober 2017 Pukul 16:10 WIB

Website Resmi BPS Kabupaten Sleman: <https://slemankab.bps.go.id/>. Diakses 17 Oktober 2017 Pukul 22:40 WIB

Website Resmi Kabupaten Sleman: <https://www.slemankab.go.id/>. Diakses 17 Oktober 2017 Pukul 21:15 WIB

Website Resmi Kecamatan Sleman: <http://slemankec.slemankab.go.id/>. Diakses 17 Oktober 2017 Pukul 23.33 WIB